

# KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 25 Agustus 2022



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Antaraneews.com	Kamis, 25 Agustus 2022	Kementerian PUPR Bangun Jalan Lingkar Sepaku, Permudah Konektivitas Menuju IKN Nusantara*	<p>Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus melanjutkan pembangunan di bidang konektivitas, salah satunya yaitu dengan pelaksanaan pembangunan Jalan Lingkar Sepaku yang merupakan jalan nasional yang menjadi akses utama menuju IKN Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan.</p> <p><a href="https://www.antaranews.com/berita/3076741/kementerian-pupr-bangun-jalan-lingkar-sepaku-akses-utama-ke-ikn">https://www.antaranews.com/berita/3076741/kementerian-pupr-bangun-jalan-lingkar-sepaku-akses-utama-ke-ikn</a></p> <p><a href="https://nasional.kontan.co.id/news/permudah-konektivitas-menuju-ikn-kementerian-pupr-bangun-jalan-lingkar-sepaku">https://nasional.kontan.co.id/news/permudah-konektivitas-menuju-ikn-kementerian-pupr-bangun-jalan-lingkar-sepaku</a></p> <p><a href="https://rri.co.id/ekonomi/1596426/jalan-lingkar-sepaku-permudah-konektivitas-menuju-ikn?utm_source=terbaru_widget&amp;utm_medium=internal_link&amp;utm_campaign=General%20Campaign">https://rri.co.id/ekonomi/1596426/jalan-lingkar-sepaku-permudah-konektivitas-menuju-ikn?utm_source=terbaru_widget&amp;utm_medium=internal_link&amp;utm_campaign=General%20Campaign</a></p> <p><a href="https://jnnews.co.id/kementerian-pupr-bangun-jalan-lingkar-sepaku-permudah-konektivitas-menuju-ikn-nusantara/">https://jnnews.co.id/kementerian-pupr-bangun-jalan-lingkar-sepaku-permudah-konektivitas-menuju-ikn-nusantara/</a></p> <p><a href="https://money.kompas.com/read/2022/08/24/163600426/akses-utama-menuju-ikn-nusantara-sudah-capai-77-persen?utm_source=Google&amp;utm_medium=Newstand&amp;utm_campaign=partner">https://money.kompas.com/read/2022/08/24/163600426/akses-utama-menuju-ikn-nusantara-sudah-capai-77-persen?utm_source=Google&amp;utm_medium=Newstand&amp;utm_campaign=partner</a></p> <p><a href="https://www.timesindonesia.co.id/read/news/424877/kementerian-pupr-ri-bangun-jalan-lingkar-sepaku-permudah-konektivitas-menuju-ikn-nusantara">https://www.timesindonesia.co.id/read/news/424877/kementerian-pupr-ri-bangun-jalan-lingkar-sepaku-permudah-konektivitas-menuju-ikn-nusantara</a></p> <p><a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20220824/45/1570186/kemenerian-pupr-tender-proyek-jalan-nasional-ikn-siap-dikontrak">https://ekonomi.bisnis.com/read/20220824/45/1570186/kemenerian-pupr-tender-proyek-jalan-nasional-ikn-siap-dikontrak</a></p> <p><a href="https://independensi.com/2022/08/24/kementerian-pupr-bangun-jalan-lingkar-sepaku-permudah-konektivitas-menuju-ikn-nusantara/">https://independensi.com/2022/08/24/kementerian-pupr-bangun-jalan-lingkar-sepaku-permudah-konektivitas-menuju-ikn-nusantara/</a></p> <p><a href="https://money.kompas.com/read/2022/08/24/163600426/akses-utama-menuju-ikn-nusantara-sudah-capai-77-persen">https://money.kompas.com/read/2022/08/24/163600426/akses-utama-menuju-ikn-nusantara-sudah-capai-77-persen</a></p> <p><a href="https://wartaekonomi.co.id/read438754/">https://wartaekonomi.co.id/read438754/</a></p>

				<p>konektivitas-menuju-ikn-nusantara-kementerian-pupr-bangun-jalan-lingkar-sepaku</p> <p><a href="https://kumparan.com/kumparanbisnis/kementerian-pupr-mulai-bangun-jalan-nasional-menuju-ikn-nusantara-1yitRZDNYar">https://kumparan.com/kumparanbisnis/kementerian-pupr-mulai-bangun-jalan-nasional-menuju-ikn-nusantara-1yitRZDNYar</a></p>
2	Industry.co.id	Kamis, 25 Agustus 2022	Kementerian PUPR Lakukan Pemeliharaan Jalan Tol Dalam Kota dan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo di Sejumlah Titik	<p>Kementerian PUPR terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk terus meningkatkan pelayanan jalan tol guna keselamatan dan kenyamanan para pengendara. Salah satunya dengan melakukan pemeliharaan jalan tol secara rutin. Saat ini yang tengah dilakukan peningkatan ruas adalah Tol Dalam Kota dan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo. Pekerjaan pemeliharaan berupa scrapping, filling dan overlay (SFO) dan Rekonstruksi Perkerasan yang dilakukan pada 22-28 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB.</p> <p><a href="https://www.industry.co.id/read/111815/kementerian-pupr-lakukan-pemeliharaan-jalan-tol-dalam-kota-dan-tol-prof-dr-ir-sedyatmo-di-sejumlah-titik">https://www.industry.co.id/read/111815/kementerian-pupr-lakukan-pemeliharaan-jalan-tol-dalam-kota-dan-tol-prof-dr-ir-sedyatmo-di-sejumlah-titik</a></p> <p><a href="https://www.timesindonesia.co.id/read/news/424876/kementerian-pupr-ri-lakukan-pemeliharaan-jalan-tol-dalam-kota-dan-tol-prof-dr-ir-sedyatmo-di-sejumlah-titik">https://www.timesindonesia.co.id/read/news/424876/kementerian-pupr-ri-lakukan-pemeliharaan-jalan-tol-dalam-kota-dan-tol-prof-dr-ir-sedyatmo-di-sejumlah-titik</a></p> <p><a href="https://wartaekonomi.co.id/read438750/pupr-dorong-bujt-lakukan-pemeliharaan-jalan-tol-dalam-kota-dan-tol-prof-dr-ir-sedyatmo">https://wartaekonomi.co.id/read438750/pupr-dorong-bujt-lakukan-pemeliharaan-jalan-tol-dalam-kota-dan-tol-prof-dr-ir-sedyatmo</a></p> <p><a href="https://jnnews.co.id/dilakukan-pemeliharaan-jalan-tol-dalam-kota-dan-tol-prof-dr-ir-sedyatmo-di-sejumlah-titik/">https://jnnews.co.id/dilakukan-pemeliharaan-jalan-tol-dalam-kota-dan-tol-prof-dr-ir-sedyatmo-di-sejumlah-titik/</a></p> <p><a href="https://desanews.hallo.id/nasional/pr-1244251293/tingkatkan-keselamatan-dan-kenyamanan-pengendara-dilakukan-pemeliharaan-jalan-tol-di-sejumlah-titik">https://desanews.hallo.id/nasional/pr-1244251293/tingkatkan-keselamatan-dan-kenyamanan-pengendara-dilakukan-pemeliharaan-jalan-tol-di-sejumlah-titik</a></p>
3	Jawapos.com	Kamis, 25 Agustus 2022	Kementerian PUPR Latih 1.565 Pekerja Jelang Groundbreaking IKN	<p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya berencana menggelar pelatihan untuk 1.565 pekerja di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Sabtu (27/8). Itu dilakukan menjelang peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.</p> <p><a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/24/08/2022/kementerian-pupr-latih-1-565-pekerja-jelang-groundbreaking-ikn/">https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/24/08/2022/kementerian-pupr-latih-1-565-pekerja-jelang-groundbreaking-ikn/</a></p> <p><a href="https://www.republika.co.id/berita/rh25pr428/jelang-groundbreaking-ikn-">https://www.republika.co.id/berita/rh25pr428/jelang-groundbreaking-ikn-</a></p>

				kementerian-pupr-latih-1565-pekerja <a href="https://koran-jakarta.com/kementerian-pupr-latih-1-565-pekerja-di-groundbreaking-ikn?page=all">https://koran-jakarta.com/kementerian-pupr-latih-1-565-pekerja-di-groundbreaking-ikn?page=all</a>
--	--	--	--	--

Judul	<b>HARI PERUMAHAN NASIONAL 2022 - Jalan Panjang Perumahan Rakyat</b>	Tanggal	22 Agustus 2022
Media	Kompas, Halaman 9		
Resume	Hari Perumahan Nasional yang diperingati pada 25 Agustus masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Pemenuhan hak dasar papan yang layak dan terjangkau masih jauh dari harapan. Sesuai data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun 2021 masih ada 12,75 juta rumah tangga yang belum memiliki hunian serta 29,45 juta rumah tangga menempati rumah tidak layak huni.		

## HARI PERUMAHAN NASIONAL 2022

# Jalan Panjang Perumahan Rakyat

**H**ari Perumahan Nasional yang diperingati pada 25 Agustus masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Pemenuhan hak dasar papan yang layak dan terjangkau masih jauh dari harapan.

Pandemi Covid-19 kian menyadarkan perumahan tidak hanya untuk tempat tinggal, tetapi juga tempat bekerja atau berproduksi. Namun, hingga kini, masyarakat dihadapkan pada kesulitan memiliki ataupun menempati rumah layak huni dan terjangkau.

Sesuai data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun 2021 masih ada 12,75 juta rumah tangga yang belum memiliki hunian serta 29,45 juta rumah tangga menempati rumah tidak layak huni. Sekitar 60 persen rumah tangga yang belum memiliki rumah berpendapatan dari sektor informal. Sementara, laju kekurangan (*backlog*) rumah terus bertambah, rata-rata 800.000 unit per tahun, seiring bertambahnya jumlah keluarga baru.

Pemerintah telah mengalokasikan 1 juta rumah dengan bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema bantuan itu terdiri atas tiga jenis, yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan subsidi bantuan uang muka (SBUK), bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), serta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Guna mengejar target pemerintah mengatasi seluruh *backlog* rumah pada tahun 2045, jumlah rumah yang harus disediakan berkisar 1-2 juta unit per tahun. Akan tetapi, penyaluran FLPP rata-rata hanya mencakup 200.000 unit rumah per tahun.

Sebanyak 60 persen kebutuhan rumah tinggal berada di perkotaan. Dengan lahan serba terbatas, rumah susun menjadi solusi hunian di perkotaan. Namun, akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah susun di perkotaan masih sangat rendah.

Dari capaian penyaluran FLPP sekitar 1,06 juta unit untuk MBR hingga tahun 2021, hanya 528 unit atau 0,05 persen berupa rumah susun. Selebihnya berupa rumah tapak di pinggiran perkotaan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, rumah tapak di luar kota lebih dipilih MBR demi mengejar harga yang terjangkau. Meski demikian, hunian di pinggiran atau luar perkotaan dapat memicu persoalan baru.

### Tantangan

"Memfasilitasi masyarakat untuk tinggal di luar perkotaan di satu sisi seolah-olah membantu, tetapi justru menyusahkan karena (masyarakat) makin jauh dari tempat kerjanya sehingga ada tambahan biaya transportasi. Inilah tantangan yang harus kita jawab," ujar Herry, dalam pembukaan Hari Perumahan Nasional 2022 dan Seminar Nasional Implementasi Proyek Percontohan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun di Daerah, pekan lalu.

Herry menerangkan, rendahnya serapan rumah susun bersubsidi disebabkan kesalahan skema FLPP yang lebih condong ke pembiayaan rumah tapak. Dicontohkan, harga rumah tapak bersubsidi Rp 160 juta per unit, menyasar masyarakat berpenghasilan bulanan Rp 5 juta-Rp 8 juta.

Adapun harga unit rumah susun dipatok Rp 320 juta sehingga hanya bisa terjangkau lapisan masyarakat berpenghasilan Rp 7 juta-Rp 8 juta. Sementara pembangunan proyek rumah susun bersubsidi oleh pengembang terhenti. "Kalau skema FLPP didesain untuk rumah vertikal, tentu pengembang akan berlomba bangun rumah vertikal," ujar Herry.

Pihaknya tengah mendorong pembangunan rumah susun (rusun) umum dengan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG). Program SKBG satuan rusun dilakukan dengan menyewa la-

han pemerintah, barang milik negara (BMN), barang milik daerah (BMD) ataupun tanah wakaf. Sewa lahan untuk SKBG berlaku untuk jangka waktu 60 tahun.

Program SKBG satuan rusun ini diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun. Aturan itu, antara lain, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan UU No 28/2022 tentang Bangunan Gedung.

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan rusun dengan SKBG mencapai 250.000 unit dalam tiga tahun ke depan. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah diharapkan menjadi percontohan SKBG. Harapannya, kepemilikan rumah susun dengan SKBG di atas lahan sewa itu mampu dijangkau masyarakat berpenghasilan Rp 4 juta per bulan.

Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta Eko Mardianta mengungkapkan, masih banyak kendala dari sisi pemda untuk implementasi rumah susun dengan SKBG, terutama terkait aspek alas hak kepemilikan.

Regulasi teknis terkait sewa-menyewa lahan milik daerah atau negara selama 60 tahun belum memiliki klausul yang kuat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, jangka sewa lahan daerah maksimum 5 tahun.

Aspek pengalihan unit SKBG juga butuh kejelasan regulasi. "Sejauh mana lembaga yang ada bisa melakukan pengalihan unit untuk MBR lain sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial yang akhirnya merugikan MBR," ujarnya.

Direktur Pemasaran Perumahan Tambok Setyawati mengemukakan, pihaknya pernah menggarap rumah susun bersubsidi dengan program FLPP. Program rusun dengan SKBG pada lahan sewa merupakan hal baru sehingga pihaknya masih harus menghi-

tung jangka waktu pengambilan modal. Tantangan lain adalah pembiayaan perbankan untuk rusun yang lahannya belum dimiliki.

### Butuh kolaborasi

Ketua Umum The Housing and Urban Development (HUD) Institute Zulfy Syarif Koto menilai, penerapan program rusun dengan SKBG idealnya dapat menurunkan harga jual rusun bersubsidi bagi MBR. Namun, penerapannya dinilai tidak mudah karena hambatan harmonisasi sejumlah regulasi yang saling mengikat. Di sisi lain, kondisi setiap daerah berbeda-beda. Diperlukan harmonisasi regulasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait pemanfaatan tanah milik negara dan daerah, maupun tanah wakaf.

"Rumah susun SKBG dengan jangka waktu hanya 60 tahun tidak seindah yang dibayangkan," katanya.

Ia mengingatkan, program 1.000 *tower* rumah susun sederhana milik (rusunami) yang dicanangkan pemerintah sejak 2007 akhirnya mati pelan-pelan karena pelaksanaan tidak sesuai perencanaan awal. Selain minimnya insentif bagi pengembang untuk membangun rusunami bersubsidi, banyak pula ditemukan peruntukan rusunami yang salah sasaran. Minimnya koordinasi dan harmonisasi juga membuat Pemprov DKI Jakarta menyetel proyek pembangunan rusunami bersubsidi yang izinnya masih dalam proses.

Persiapan lain, paradigma sebagian MBR yang belum terbiasa dan berminat membeli rusun di atas lahan sewa karena tidak bisa diwariskan. Solusi yang diperlukan ialah menyamakan regulasi agar sewa atau kerja sama pemanfaatan lahan negara, daerah, dan wakaf mencapai 99 tahun. Selain itu, diperlukan teknologi bangunan rusun agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Rusun perlu jadi solusi utama dalam problem alih fungsi lahan untuk pembangunan rumah tapak.

"Pembangunan rumah rakyat bukan setumpuk besi, beton, dan pasir, tapi membangun peradaban bangsa dan negara. Tidak ada negara yang

**Kalau skema FLPP didesain untuk rumah vertikal, tentu pengembang akan berlomba bangun rumah vertikal.**





KOMPAS/AGUS SUSANTO

**Alat berat** digunakan untuk meratakan lahan hunian baru di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/8/2022). Jumlah masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah masih sangat tinggi.

kuat, tanpa perumahan yang kuat. Tanpa kesamaan persepsi dan harmonisasi, pemenuhan rumah rakyat masih butuh waktu panjang,” ujar Zulfi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen atau setara 11 juta rumah tangga. Untuk mewujudkan itu, pemerintah, di antaranya,

menggulirkan program 1 juta rumah, dengan target rumah terbangun berjumlah 875.000 sampai tahun 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pemerintah dan negara bertanggung jawab memfasilitasi dan mendukung penyediaan perumahan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Program perumahan juga telah menjadi bagian target peme-

rintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Selama ini, penyediaan perumahan bertumpu pada pengembang, sedangkan pemerintah memfasilitasi penyediaan dan pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya mewujudkan hunian layak dan terjangkau memerlukan kolaborasi dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan.

(BM LUKITA GRAHADYARINI)